**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI**

* 1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang teori kepustakaan yang menyajikan penelitian untuk mendukung berbagai pemecahan masalah sebagai dasar yang digunakan selanjutnya terhadap analisis yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Untuk membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, peneliti menyajikan teori – teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan akan diuraikan secara singkat.

* + 1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung oleh Indra Kristian (2021)

Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Perubahan kedua atas peraturan walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Telah berupaya untuk melaksanakan penertiban mengenai pedagang kaki lima tersebut. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan kesamarataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan analisis kualitatif deskriptif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan kriteria evaluasi kebijakan.

Berdasarkan kajian terhadap meteri kebijakan penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data – data pencapaiannya, ktiteria – kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah, yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan Kiara Condong tersebut.

1. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung : Studi Kasus Di Kecamatan Regol Oleh Karine Alexandra Yufian (2019)

Penelitian ini membahas evaluasi kinerja kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pkl Kota Bandung. penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 yaitu kebijakan zonasi, kebijakan relokasi dan kegiatan bimbingan teknis khususnya di kecamatan Regol. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori evaluasi oleh William Dunn, yang terdiri dari enam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan kesamarataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pemngumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, diambil sebanyak 20 informan yang terdiri dari pedagang kaki lima dan masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Regol, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 3 kegiatan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 khususnya di Kecamatan Regol masih berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Bandung selaku pembuat kebijakan perlu memberikan fasilitas kepada PKL dan membuat alternatif kebijakan lainnya. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan rekrutmen. Evaluasi yang dilaksanakan sekiranya tidak hanya menjadi sebuah formalitas saja, tetapi betul – betul menjadi sebuah rekomendasi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

1. Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun – Alun Ngawi oleh Wahyudhi Puruhita (2015)

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui PERDA Nomor 6 Tahun 2013, Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah berupaya untuk mengatur PKL di kawasan Alun – Alun Ngawi. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan pkl dikawasan Alun – Alun Ngawi. Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan indikator evaluasi kebijakan

Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data – data pencapaiannya, kriteria – kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secapa optimal, kecuali kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah, yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan Alun – alun Ngawi.

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas yang digunakan sebagai referensi penulis untuk kelancaran dalam penelitian ini. Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama  Peneliti | Judul  Penelitian | Persamaan dan Perbedaan | | | |
| Teori yang  Digunakan | Pendekatan | Metode | Teknik  Analisis |
| 1 | Indra Kristian | Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung | William Dunn | Kualitatif | Deskriptif | Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi |
| 2 | Karine Alexandra yufian | Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pkl di Kota Bandung : Studi Kasus Di Kecamatan Regol | William Dunn | Kualitatif | Deskriptif | Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi |
| 3 | Wahyudhi puruhita | Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun – Alun Ngawi | William Dunn | Kualitatif | Deskriptif | Observasi,  Wawancara  dan  dokumentasi |

Sumber : data diolah Peneliti,2024

Tabel diatas memperlihatkan bagaimana perbedaan penelitian ini dengan terdahulu. Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian. Dengan demikian penelitian ini merupakan pengembangan bagi peneliti sebelumnya dari sisi lokus penelitian yang berbeda. Setelah memahami perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisil.

* + 1. Kajian Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ *ad* “ dan *“ ministrate*” yang berarti “ *to serve* “ yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban. (2008:2) “ administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip – prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan – pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan area bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki ( Syafi’e dkk dalam Pasolog,2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan – keputusan dalam dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga mengatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka baik atau penting untuk mesyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban,2008:4).

Menurut Gray dalam Harbani Pasolong (2010:18) yakni peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Administrasi publik melindungi hak – hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan masyarakat yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
   * 1. Kajian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

1. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

1. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

1. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors),* namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

1. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum

* + 1. Kajian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan kebjakan pada kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya pada suatu kebijakan (Winarno 2007). Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno,2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact)* dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang

* 1. Kerangka Berpikir

Mengetahui sejauh mana kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima perlu dilakukan analisis secara mendalam terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori William Dunn(2003).

Penjelasan yang lebih spesifik dikemukakan oleh William Dunn. Terdapat enam kriteria yang harus diperhatikan :

1. Efektivitas

Menurut Winarno (2002:184) efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas biasa juga disebut nilai guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesunguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program – program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut. Efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan dalam waktu tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana program – program terlaksana secara optimal.

Pencapaian tujuan – tujuan dari organisasi semakin besar, maka akan semakin besar pula efektivitasnya. Adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan – tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal, namun terkadang suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program – program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan dalam waktu tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana program – program terlaksana secara optimal.

1. Efisiensi

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai suatu kebijakan publik sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

1. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

1. Perataan

Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas dan sosial yang merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat didistribusikan secara merata.

1. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan sebarapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi saat suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan ataupun berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya ( efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan ) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi atau nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan.

1. Ketepatan

Kriteria kelayakan atau ketepatan dihubungkan dengan analisis substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau intrumen untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keberhasilan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Alun – alun Kota Bandung

Faktor penghambat dan konsekuensi

Kebijakan yang memberikan hasil sesuai dengan tujuan kebijakan

Kriteria Evaluasi Kebijakan

(William dunn 2003)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. ketepatan

**EVALUASI KEBIJAKAN**

* 1. **Proposisi**

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap sebuah fenomena yang terjadi atau bisa juga disebut sebagai sebuah pernyataan yang digunakan untuk melukiskan sebuah kenyataan yang belum tentu benar ataupun salah didalam bentuk sebuah kalimat berita.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut ini proposisi mengenai Evaluasi Kebijakan Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun – Alun Kota Bandung sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Alun – Alun belum efektif yang terlihat dari masih banyaknya pedagang yang terlihat berjualan di area taman Alun - Alun Bandung..
2. Terdapat hambatan dalam penataan di Alun – Alun Kota Bandung dengan melihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.